



Media Title	Bisnis Indonesia	
Date	21 Oktober 2014	Color
Section	News	Circulation
Page No	29	Article Size
Journalist	Fitri Sartina Dewi	Advalue
Frequency	Daily	PR Value

► PEMERINTAHAN BARU

Perbaikan Infrastruktur Harus Jadi Prioritas

JAKARTA—Pelaku usaha berharap pemerintahan baru segera melakukan perbaikan infrastruktur guna mengakselerasi perekonomian nasional.

Fitri Sartina Dewi
fitri.sartina@bisnis.co.id

Berdasarkan hasil survei *Bisnis Indonesia Intelligence Unit* periode Agustus-Oktober 2014, masalah perbaikan infrastruktur menempati urutan kedua yaitu 36,5% sebagai persoalan yang harus segera ditangani oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Menanggapi hasil survei tersebut, Ketua Umum Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Fatchur Rohman mengatakan perlu komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memperbaiki masalah infrastruktur di Indonesia.

"Pemerintah yang kemarin kurang punya komitmen. Kalau mereka punya komitmen, maka mereka akan mengupayakan segala cara supaya pembangunan infrastruktur bisa dipercepat," katanya kepada *Bisnis*, Senin (20/10).

Dia mengungkapkan kekurangan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono adalah tidak adanya keberanian untuk menghapuskan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai sebagai satu-satunya beban terhadap APBN. Akibatnya, lanjut Fatchur, banyak rencana pembangunan infrastruktur yang tertunda karena keterbatasan anggaran.

"Jokowi harus berani untuk mencabut subsidi BBM, dengan begitu beban pengeluaran pemerintah akan berkurang," ujarnya.

Pemerintah akan memiliki lebih banyak alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang konektivitas yaitu jalan, serta pembangunan infrastruktur di bidang ketahanan pangan, apabila berani mencabut subsidi BBM.

Selain itu, permasalahan lahan juga perlu segera diselesaikan karena selama ini menjadi salah satu penghambat laju percepatan pembangunan jalan tol.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Fatchur berpendapat pemerintah perlu mengkaji ulang adanya Peraturan Presiden (Perpres) No.99/2014 yang diteken oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 September 2014 lalu.

Dalam Perpres No.99/2014 itu disebutkan bahwa lahan pembangunan proyek infrastruktur yang *progress*-nya sudah mencapai 75% hingga akhir 2014 akan tetap menggunakan peraturan lama, sedangkan untuk lahan yang *progress*-nya masih dibawah 75% akan tetap menggunakan peraturan baru sesuai yang tercantum dalam UU No.2/2012.

"ATI berpendapat agar pemerintah tidak menunda dan sebaiknya tetap menerapkan UU No.2/2012 untuk membebaskan lahan pada tahun depan," katanya.

Ketua Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto menyatakan para pengusaha menaruh harapan besar terkait perkembangan pembangunan infrastruktur

► Perbaikan infrastruktur guna mengakselerasi perekonomian nasional.

► Pemerintah perlu cabut subsidi bahan bakar minyak sehingga dapat memiliki lebih banyak alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

nasional selama masa pemerintahan Jokowi-JK.

Menurutnya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7% yang ditargetkan pemerintahan Jokowi, maka pemerintah harus berfokus pada perbaikan sektor infrastruktur yang bisa mendukung roda perekonomian seperti transportasi dan logistik.

"Infrastruktur yang layak akan semakin menciptakan iklim investasi yang kondusif. Sebaliknya, kalau infrastruktur tidak memadai, maka akan sulit untuk menarik minat investor," jelasnya.

Untuk mempercepat perkembangan pembangunan infrastruktur nasional, Suryo meminta pemerintah agar bisa lebih menarik minat swasta, baik dalam pembangunan maupun pendanaan proyek-proyek infrastruktur.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bastary Pandji Indra. Dia mengungkapkan untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan sejumlah proyek infrastruktur dibutuhkan lebih banyak lagi peran swasta.

Namun, ada empat masalah yang harus diselesaikan oleh Jokowi agar swasta berminat menggarap proyek infrastruktur. Pertama, pengadaan lahan, yang ditengarai sebagai penyebab utama mandeknya se-

jumlah pengerjaan proyek infrastruktur. Kedua, pembiayaan, pemerintah diminta untuk bisa lebih mengelaborasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur dari berbagai sumber pendanaan baik dari investasi dalam negeri maupun asing.

Ketiga, *delivery mechanism* yaitu dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah agar bisa mendukung dan merealisasikan program-program pembangunan infrastruktur. Keempat, pemerintah diminta untuk membuat regulasi yang lebih terbuka, sehingga lebih banyak investor lokal maupun asing yang berminat untuk ikut berinvestasi dalam pembangunan proyek infrastruktur.

"Kalau keempat tantangan itu berhasil dilewati, maka bisa dipastikan pembangunan infrastruktur nasional bisa dipercepat," katanya.

PROYEK MP3EI



Sementara itu, Direktur Eksekutif INDEF Ahmad Erani Yustika menyebutkan pemerintahan Jokowi bisa meminimalkan beban pembangunan proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) warisan pemerintahan SBY.

Menurutnya, pemerintahan baru bisa meninjau kembali pelaksanaan proyek MP3EI berdasarkan skala prioritas yang telah direncanakan dalam visi dan misi atau arah pembangunan pemerintah selama 5 tahun ke depan.

"Pemerintah bisa mempertimbangkannya. Proyeknya bisa saja gagal direalisasikan karena pemerintahan baru sudah memiliki prioritas dan tujuannya sendiri," ujarnya.

Dalam pidato kenegaraannya yang pertama, Presiden Jokowi akan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dengan lebih mengedepankan pembangunan infrastruktur di kawasan samudera, laut, selat, dan teluk.

Jokowi dalam berbagai kesempatan seringkali mengungkapkan rencana pembangunan tol laut untuk mengatasi masalah transportasi dan logistik yang selama ini mengandalkan jalur darat. Selama ini, biaya logistik semakin membengkak karena kondisi jalan yang belum mendukung efisiensi.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum (PU), masih ada 43 proyek infrastruktur yang termasuk dalam MP3EI yang diwariskan SBY. Proyek MP3EI itu meliputi pembangunan jalan tol dan jalan nasional, jalur kereta, sistem penyediaan air minum, bendungan dan sebagainya.

Adapun, proyek tersebut tersebar dalam koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Maluku. Total investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek tersebut adalah Rp375,7 triliun. □

Proyek MP3EI Warisan Pemerintahan SBY

Total Proyek: 43	Koridor Kalimantan
Tahun: 2011-2014	Total: 11 proyek
Kebutuhan Investasi: Rp375,7 triliun	Peresmian: 5 proyek
	Groundbreaking: 2 proyek
	Dilaporkan: 4 proyek
Koridor Sumatera	Koridor Sulawesi
Total: 11 proyek	Total: 13 proyek
Groundbreaking: 2 proyek	Peresmian: 6 proyek
Dilaporkan: 9 proyek	Dilaporkan: 7 proyek
Koridor Jawa	Koridor Bali-Nusa Tenggara
Total: 19 proyek	Total: 9 proyek
Peresmian: 4 proyek	Peresmian: 2 proyek
Dilaporkan: 15 proyek	Dilaporkan: 4 proyek
Koridor Papua-Maluku	Koridor Papua-Maluku
Total: 10 proyek	Total: 10 proyek
Peresmian: 6 proyek	Peresmian: 6 proyek
Dilaporkan: 4 proyek	Dilaporkan: 4 proyek

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat